

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Poin Penting dalam membangun perekonomian nasional adalah sektor Usaha Mikro Kecil (UMK). Kinerja dan aktivitas sektor UMK semakin meningkat sejak krisis ekonomi melanda negara kita. Mengingat UMK adalah tolak ukur pembangunan nasional, maka perlu adanya dukungan terhadap sektor ini (Tambunan, 2012). Untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) no 8 yaitu menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tenaga kerja produktif beserta pekerjaan yang layak untuk semua, Usaha Mikro, Kecil (UMK) mampu memimpin untuk memenuhi pilar-pilar ekonomi agenda pembangunan dunia pada tahun 2030. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, UMK memiliki peran krusial dalam membuka peluang kerja, menciptakan lingkungan kerja yang layak, mendorong inovasi bisnis, serta menyesuaikan diri dan mengurangi dampak negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional perusahaan..

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Selain itu, UMK juga berfungsi sebagai penopang utama perekonomian rakyat. Semakin banyak UMK yang berkembang, semakin kuat daya tahan ekonomi, sehingga stabilitas pembangunan ekonomi dapat terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan dan goncangan ekonomi (Anwar, 2016).

Namun, Hastuti dkk (2020) menegaskan bahwa usaha mikro dan kecil menghadapi situasi yang menantang dalam menghadapi transformasi bisnis. Tingginya volume perdagangan bebas dalam dan luar negeri, secara tidak langsung mendorong daya saing perdagangan di semua domain, membuat bisnis menjadi lebih kompetitif. Kendala untuk UMK memasuki pasar global yaitu, harus mengetahui bahwa bisnis selanjutnya harus semakin terstruktur, dimana persaingan pasar akan semakin tinggi, serta perubahan yang cepat dikarenakan kemajuan teknologi.

Menurut Anugrah (2021) melihat perekonomian di Indonesia, usaha mikro kecil adalah suatu gerakan ekonomi nasional dan keberadaannya menyumbang

hampir 99% perekonomian di Indonesia. UMK ini dipilih oleh masyarakat karena usaha ini mudah dikelola, kebutuhan modal yang rendah dan waktu operasionalnya yang fleksibel. UMK juga menjadi suatu kegiatan yang bisa menghasilkan tenaga kerja, yang berarti mengurangi angka pengangguran. Selain itu, peran UMK adalah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan meminimalisir kemiskinan.

Dengan banyaknya permasalahan yang dialami usaha mikro kecil di Indonesia maka pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan UMK. Pembinaan UMK merupakan tugas Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembinaan yang dilakukan mengambil data dan melakukan identifikasi masalah serta potensi UMK, susunan program pembinaan dan pengembangan yang mengatasi permasalahan pada UMK, melakukan pembinaan dan mengembangkan UMK serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program Pembinaan UMK.

Menurut Kemenkop UKM tahun 2022 UMK di negara Indonesia terdapat 9.137.376 di tahun 2022. Sumatera Barat secara nasional berada pada posisi ketiga dari wilayah Sumatera lainnya. Berikut jumlah UMK di 10 Provinsi Sumatera.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Kecil Mikro di Wilayah Sumatera Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah UMK
1	Sumatera Utara	595.779
2	Sumatera Selatan	330.693
3	Sumatera Barat	296.052
4	Lampung	285.909
5	Riau	252.574
6	Aceh	229.101
7	Bengkulu	85.523
8	Kep.Riau	76.217
9	Jambi	57.597
10	Kep. Bangka Belitung	30.770

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM,2022

Berdasarkan Tabel 1.1 banyaknya UMK di Sumatera Barat mencapai 296.052 unit. Jumlah UMK di Provinsi Sumatera Barat cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah UMK di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Di daerah Sumatera

Barat terdapat 19 kab /kota yang mempunyai usaha mikro kecil yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu nya adalah ibu kota Sumatera Barat yaitu kota Padang yang menjadi peran penting dalam meningkatkan perekonomian Sumatera Barat khususnya dalam pengembangan UMK. Berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan UMK guna untuk menunjang sektor perekonomian. Salah satunya yaitu dengan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui berbagai acara yang dapat menarik wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang dan menjadi pangsa pasar untuk berbagai produk Usaha Mikro Kecil.

Menurut Niode (2009) kendala yang dihadapi oleh sektor UMK dapat diklasifikasikan menjadi masalah internal, masalah eksternal dan masalah struktural. Melihat kendala tersebut, pemberdayaan menjadi langkah yang tepat untuk mengatasinya. Konsep pemberdayaan merujuk pada upaya mengoptimalkan potensi ekonomi guna meningkatkan produktivitas baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam (Kartasasmita, 1996). Hal ini sejalan dengan teori *human capital*, yang menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan dan program pemberdayaan (Sianipar, 2015).

Upaya pemberdayaan terus dilakukan Dinas Koperasi dan UMK di kota Padang. Terdapat 5 kelompok usaha yang dapat binaan dari dinas koperasi yaitu UMK kemasan,ritel,saji jasa dan juga kerajinan, yang menyebar di 11 kecamatan kota Padang. Berikut Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dapat binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang.

Tabel. 1.2 Jumlah UMK Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Padang pada tahun (2022)

No	Kecamatan	Usaha mikro kecil	Jenis Usaha				
			Saji	Jasa	Kemasan	Ritel	Kerajinan
1	Padang Barat	4100	1906	410	191	1538	55
2	Padang Selatan	3854	1538	293	477	1479	64
3	Padang Timur	4302	1413	485	367	1917	120
4	Padang Utara	2682	930	267	287	1091	107
5	Nanggalo	2138	740	261	286	791	60
6	Koto Tangah	6215	1891	566	595	2924	239
7	Kuranji	6523	1963	953	640	2676	291
8	Pauh	3009	884	345	225	1456	99
9	Lubuk Kilangan	1922	501	227	202	912	80
10	Lubuk Begalung	5133	1486	673	510	2474	145
11	Bungus	1912	671	152	140	938	18
	Total	41787	13293	4532	3920	18196	1278

Sumber : Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang, 2022

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa jumlah UMK di Kecamatan Kuranji memiliki Jumlah UMK terbanyak di setiap jenis usaha. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Padang Barat yang memiliki jumlah pelaku UMK sebanyak 4100 unit, dimana cukup jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kecamatan Kuranji. Jika dilihat dari Kecamatan Padang Barat dengan daerah yang memiliki banyaknya kawasan wisata, hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMK untuk memulai suatu usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Konsep pemberdayaan menurut Nugroho (2014), pemberdayaan adalah suatu bentuk aktivitas untuk melakukan suatu kegiatan yang membangun menjadi yang lebih baik. Hal itu diartikan sebagai suatu proses yang membangun suatu daya kepada masyarakat dengan memberikan dorongan dan menambah keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya. Dengan didukung

produktivitas para pelaku UMK), tantangan yang biasa bagi UMK terdapat pada masalah seperti produktivitas yang rendah, sulitnya mengakses input, manajemen modal, dan kurangnya mentor (Haryono dan Khoriyah ,2013). Oleh sebab itu, agar UMK dapat berkembang, dan berkelanjutan adalah dengan memberdayakan UMK, baik melalui pelatihan, pendampingan, pembinaan atau lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan/keterampilan, menurut Todaro (2020), pengetahuan dan keterampilan memungkinkan individu untuk berkinerja lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pengetahuan dan keterampilan akan meningkatkan inisiatif dan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan berujung pada peningkatan pendapatan usaha (keuntungan).

Dengan memperhatikan kondisi UMK di wilayah Kecamatan Padang Barat, maka penelitian ini memfokuskan analisis bagaimana tingkat Pendapatan pelaku UMK setelah di dapatkannya pemberdayaan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Pendapatan Pelaku UMK Di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas maka muncul permasalahan bagaimana pengaruh pemberdayaan UMK terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat .
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari pemberdayaan UMK terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang

berkepentingan, di antaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan suatu masukan dengan memberikan kebijakan bagi pemerintah dan instansi terkait, terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Padang Barat.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan aspek yang sama untuk melakukan penelitian lebih dalam.

4. Bagi Pelaku UMK

Untuk bahan evaluasi bagi pelaku UMK dalam meningkatkan Usahanya untuk mencapai kesejahteraan di kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Membahas tentang pengaruh pemberdayaan UMK terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Padang Barat. Objek penelitian ini ialah pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Padang Barat yang telah mendapatkan pembinaan, bantuan teknis dan bantuan permodalan dari pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), Program Pendanaan BUMN, BPUM. Data penelitian didapat melalui survei langsung di lapangan dan informasi yang didapatkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini di rinci sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan konteks pertanyaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan landasan teori dari penelitian ini, dan hasil temuan para

peneliti sebelumnya, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum lokasi penelitian, kondisi UMK dan hasil penelitian serta analisis pengolahan data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjadi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dari hasil penelitian yang didapatkan dari pembahasan serta memberikan ide untuk pihak terkait.

